

PEMBINAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PADANG

Aina Florita

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: floritaa@ymail.com

Jumiati

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: upikjumiati@yahoo.co.id

Adil Mubarak

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: adilmubarak08@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi karena keberadaan UMKM di Kota Padang sangat berguna untuk membantu mengatasi masalah-masalah ekonomi dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan upaya mengatasi pengangguran serta pengentasan kemiskinan, pemerintah juga perlu untuk memberdayakan UMKM karena setiap masyarakat mempunyai potensi masing-masing yang dapat dikembangkan. Pembinaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru sehingga mampu bersaing dalam bidang jasa maupun perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMK Kota Padang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Informan penelitian ini ditentukan secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan UMKM belum berjalan secara maksimal dikarenakan, 1) Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pembinaan, 2) Kurangnya modal yang dimiliki mengakibatkan hasil produksi terbatas, 3) Kurangnya tenaga profesional dalam pembinan sehingga banyaknya pelaku usaha yang tidak mengikuti pembinaan.

Kata Kunci: Pembinaan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM

A. Pendahuluan

Betapa banyak program pemberdayaan yang sudah direalisasikan oleh pemerintah misalnya program-program pembinaan UMKM, KUR dan program-program lainnya dianggap tidak mencapai target yang sebelumnya telah dirumuskan apalagi akan berdampak pada keberdayaan masyarakat. (Adil, 2014). Pembinaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan khususnya memberikan kesempatan kepada wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Pembentukan Dinas Koperasi dan UMKM bertujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi rakyat terutama di Kota Padang sehingga mampu bersaing dalam bidang jasa maupun perdagangan. Dinas Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan beberapa instansi diantaranya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Tambang dan Energi; Dinas Pasar; Dinas Pariwisata; dan Dinas Kesehatan Kota.

Pemerintah daerah telah sering melakukan upaya pengembangan agar dapat memberdayakan UMKM melalui bimbingan, pendampingan, pemberian fasilitas, dan bantuan untuk menumbuhkan kemampuan daya saing. Mengingat keberadaan UMKM maka UMKM sangat perlu untuk diberdayakan oleh pemerintah karena keberadaan UMKM dapat mengatasi masalah ekonomi dan sosial masyarakat khususnya dalam mengatasi pengangguran serta pengentasan kemiskinan.

Perkembangan UMKM terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, jumlah wirausaha baru pada periode 2015-2016 yang terdaftar sebanyak 2.056

wirausaha baru. Pelaku usaha tersebut yang mana dikelompokkan pada 11 sektor usaha yaitu sector industri, makanan ringan, kuliner, industri kerajinan tangan/ekonomi kreatif, perdagangan, jasa, PKL, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan nelayan.

Perlunya dilakukan pembinaan terhadap UMKM karena sesuai dengan misi Pemerintah Kota Padang yang ke-4 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi. Sesuai dengan program Walikota Padang Nomor 8 yaitu mendorong perakyatan, pertumbuhan ekonomi, mencetak 1.000 wirausaha baru di Kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pentingnya UMKM sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja, maka UMKM diharapkan dapat terus berperan secara optimal dalam menanggulangi pengangguran. Peran UMKM dari perspektif kesempatan kerja, sumber pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi perdesaan juga sangat penting (Tulus, 2009)

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang mengerahkan 104 orang tenaga kerja pendamping UMKM (TP-UMKM) yang ditempatkan disetiap kelurahan di Kota Padang. Tenaga pendamping bertugas menciptakan wirausaha baru, menyusun rencana kegiatan pendampingan, melakukan pendampingan dan kegiatan konsultasi, memantau dan mengevaluasi kemajuan UMKM. Penumbuh Kembangan wirausaha baru tersebut didasari tiga indikator, yaitu menumbuhkan pelaku usaha punya usaha, pelaku usaha punya tempat usaha, dan pelaku usaha memiliki usaha.

Dengan adanya bantuan dari tenaga pendamping maka akan mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan izin usaha. Pelaku usaha juga diberikan izin usaha

Aina Florita, Jumiaty, Adil Mubarak |144

mikro kecil (IUMK) yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan pinjaman ke koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) ataupun ke bank yang menyediakan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM.

Pada kenyataannya fungsi dari tenaga pendamping belum efektif sepenuhnya. Hal ini dilihat dari pengurusan izin usaha yang tidak dapat digunakan oleh pelaku usaha, serta masih adanya pelaku usaha yang sudah menjadi anggota UMKM tetapi tidak mendapatkan pelatihan dan bantuan usaha. Kemudian untuk tujuan dari pembinaan UMKM adalah agar pelaku usaha dapat meningkatkan hasil produksi sehingga mampu bersaing dalam bidang jasa maupun perdagangan. Permasalahan mengenai pembinaan UMKM ini terlihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mendapatkan pelatihan dan pembinaan yang diberikan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis telah melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang tentang Pembinaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

B. Tinjauan Pustaka

1. Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM

Pembinaan adalah pemberian fasilitas, bimbingan dan pendampingan dalam proses pengembangan. Pengembangan yang dimaksudkan adalah pengembangan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Mengenai tata cara dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UMKM, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 1998 yang mana pembinaan dan pengembangan UMKM dilakukan dengan terarah dan terpadu untuk mewujudkan UMKM yang mandiri sehingga usaha tersebut dapat berkembang.

Pembinaan UMKM dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh UMKM, menyiapkan program pembinaan dan pengembangan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh UMKM, melaksanakan program pembinaan yang telah disiapkan, dan mengawasi kegiatan dari program pembinaan dan pengembangan UMKM tersebut. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan UMKM adanya ruang lingkup pembinaan meliputi bidang produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi.

Menurut Miftah Thoha (2003) pembinaan merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih baik. Melalui pembinaan ditunjukkan dengan adanya kemajuan dan peningkatan dalam kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2012) menjelaskan bahwa pembinaan ialah kegiatan yang bertujuan untuk peserta didik dapat mematuhi nilai-nilai yang dianut dan berlaku di masyarakat.

Pemerintah juga mengeluarkan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004. Pada PROPENAS ini ditetapkan program pokok pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil sebagai berikut:

Aina Florita, Jumiaty, Adil Mubarak | 145

1. Program penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif. Program ini bertujuan untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat untuk berkembangnya usaha kecil. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah menurunnya biaya transaksi dan meningkatnya skala usaha usaha kecil dalam kegiatan ekonomi.
2. Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif. Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Sedangkan sasarannya adalah tersedianya lembaga pendukung untuk meningkatkan akses usaha kecil terhadap sumber daya produktif, seperti SDM, modal, pasar, teknologi dan informasi.
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan usaha kecil Berkeunggulan Kompetitif. Tujuannya untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing usaha kecil. Sedangkan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produktivitas usaha kecil. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di atas untuk membina dan mengembangkan usaha kecil ternyata tidak membawa dampak yang signifikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan usaha kecil yang masih jauh dari harapan karena masih selalu terjebak pada masalah klasik dan kompleks yang dihadapi. Dari sisi internal, antara lain kualitas sumber daya manusia, modal kerja, penyediaan bahan baku,

kewirausahaan, organisasi, dan manajemen usaha. Dari sisi eksternal, meliputi pengadaan bahan baku, akses kelembaga pembiayaan/kredit, pemasaran, persaingan, birokrasi, dan dukungan kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada usaha kecil.

Pengertian pemberdayaan berdasarkan Perwako Kota Padang Nomor 35 tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 ayat 20 yaitu usaha yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk dapat berkembang terhadap UMKM sehingga dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan ayat 21 menjabarkan tentang pengembangan yang mana merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk dapat memberdayakan UMKM dengan memberikan fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan agar memiliki kemampuan daya saing.

Tujuan pemberdayaan menurut Mulyadi (2009) ialah mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang mandiri dan tangguh, meningkatkan peranan dari UMKM tersebut dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan adil. Sedangkan prinsip pemberdayaan UMKM seperti menumbuhkan kemandirian UMKM dalam berkarya dengan prakarya sendiri, mengembangkan usaha yang berorientasi pasar sesuai dengan kemampuan UMKM, meningkatkan daya saing UMKM secara terpadu, serta perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Bidang usaha baik yang berskala usaha mikro, kecil, dan menengah yang berdomisili di Indonesia pada dasarnya dalam perlindungan dan pembinaan pemerintah. Skala usaha dibedakan dalam beberapa kelompok yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Adapun definisi dari masing-masing skala usaha ditentukan seperti berikut:

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, a) Usaha Mikro merupakan usaha perorangan atau badan usaha yang memiliki asset maksimal 50 juta; b) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan asset sebesar 50 juta sampai 500 juta; c) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan asset sebesar 500 juta.

Rahmana (2008) mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria, yaitu:

1. *Livelihood Activities*, adalah kegiatan UMKM yang dilakukan sebagai upaya kesempatan kerja untuk mencari nafkah.
2. *Micro Enterprise*, adalah kegiatan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi tidak memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, adalah kegiatan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan dapat menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

Menurut Tambunan (2009) di dalam kelompok UMKM itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara usaha mikro dengan usaha kecil, dan usaha menengah dalam sejumlah aspek yang dapat mudah dilihat sehari-hari di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Aspek-aspek tersebut yaitu:

1. **Formalitas**
 Usaha Mikro: Beroperasi di sektor informal; usaha tidak terdaftar; tidak/jarang membayar pajak.
 Usaha Kecil: Beberapa beroperasi di sektor formal; beberapa tidak terdaftar; sedikit yang membayar pajak.
 Usaha Menengah: Semua usaha berada di sektor formal; terdaftar dan membayar pajak.
2. **Organisasi dan Manajemen**
 Usaha Mikro: Dijalankan oleh pemilik, tidak menerapkan pembagian kerja internal (ILD), manajemen dan struktur organisasi formal (MOF), dan sistem pembukuan formal (ACS).
 Usaha Kecil: Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan ILD, MOF, dan ACS.
 Usaha Menengah: Banyak yang mempekerjakan manajer profesional dan menerapkan ILD, MOF, dan ACS.
3. **Sifat dari Kesempatan Kerja**
 Usaha Mikro: Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga yang tidak dibayar.
 Usaha Kecil: beberapa memakai tenaga kerja yang digaji.
 Usaha Menengah: Memakai tenaga pekerja yang digaji dan memiliki sistem perekrutan formal.
4. **Pola/Sifat dari Proses Produksi**
 Usaha Mikro: Derajat mekanisme sangat rendah/umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah.
 Usaha Kecil: Beberapa memakai mesin-mesin terbaru.
 Usaha Menengah: Banyak yang punya derajat mekanisme yang tinggi/punya akses terhadap teknologi tinggi.
5. **Orientasi Pasar**
 Usaha Mikro: Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah.

Usaha Kecil: Banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor dan melayani kelas menengah atas.

Usaha Menengah: semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang ekspor dan melayani kelas menengah atas.

6. Profil ekonomi dan sosial dari pemilik usaha

Usaha Mikro: Pendidikan rendah dan dari rumah tangga miskin; motivasi utama: survival.

Usaha Kecil: Banyak berpendidikan baik dan dari rumah tangga nonmiskin; banyak yang bermotivasi bisnis/mencari profit.

Usaha Menengah: Sebagian besar berpendidikan baik dan dari rumah tangga makmur; motivasi utama: profit.

7. Sumber-sumber dari bahan baku dan modal

Usaha Mikro: Kebanyakan menggunakan bahan baku lokal dan uang sendiri.

Usaha Kecil: Beberapa menggunakan bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal.

Usaha Menengah: Banyak yang menggunakan bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal.

8. Hubungan-hubungan Eksternal

Usaha Mikro: Kebanyakan tidak punya akses ke program-program pemerintah dan tidak memiliki hubungan bisnis dengan usaha besar.

Usaha Menengah: Banyak yang punya akses ke program-program pemerintah dan punya hubungan bisnis dengan usaha besar (termasuk PMA).

Usaha Menengah: Sebagian besar punya akses ke program-program pemerintah dan banyak yang punya hubungan bisnis dengan usaha besar (termasuk PMA).

9. Derajat dari keterlibatan wanita sebagai pengusaha

Usaha Mikro: Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi.

Usaha Kecil: Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha cukup tinggi.

Usaha Menengah: Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat rendah.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif ialah penelitian yang bertujuan membuat gambaran deskriptif secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diteliti yang mana hasilnya tidak dalam bentuk angka (Sugiyono, 2005). Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Informan penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yaitu teknik dengan mempertimbangkan dengan menentukan orang-orang yang dapat memberikan data secara maksimal.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti profil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang (sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi). Dalam uji keabsahan data penelitian kualitatif menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengumpulan dan pengujian data kepada orang yang memahami tentang pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian data dianalisis dengan mereduksi data, penyajian data dan kesimpulan selama melakukan penelitian

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Keberadaan UMKM dalam prakteknya merupakan sebuah bidang usaha yang memiliki peran dalam perekonomian. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah. Pembinaan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dilaksanakan sekali dalam setahun di masing-masing kecamatan dengan bidang yang berbeda-beda. Narasumber yang dipilih oleh Dinas Koperasi dan UMKM dengan kriteria berkopetensi, disiplin, dan berpengalaman dibidangnya. Berbeda dengan pembinaan pelatihan, penyuluhan dilakukan dalam jangka waktu yang dekat. Penyuluhan yang diberikan berupa seminar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM meliputi:

- a) Bidang produksi dan pengolahan
Kegiatan produksi dan pengolahan dalam berwirausaha akan sangat menentukan keunggulan kompetitif atau tingkat daya saing usaha tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.
- b) Bidang pemasaran
Upaya peningkatan daya saing pelaku UMKM salah satunya dapat dilakukan dengan memperkuat promosi dan pemasaran produk-produk UMKM. Strategi pemasaran yang baik bagi UMKM sangat dibutuhkan karena lemahnya pemasaran merupakan

faktor penghambat dalam berwirausaha. Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang memberikan fasilitas promosi dan pemasaran dalam bentuk legalitas dan pengadaan bazar untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku UMKM.

- c) Sumber daya manusia
Dari segi sumber daya manusia, merupakan aspek penting dalam pembinaan sebab SDM yang baik dapat memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada UMKM yang mengikuti pembinaan. Dinas Koperasi dan UMKM memiliki SDM yaitu Tenaga Pendamping yang dapat mendampingi pelaku usaha dalam pembinaan untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas.
- d) Teknologi.
Di dalam berwirausaha kita juga dituntut untuk paham dengan teknologi saat ini. Teknologi yang berkembang tersebut nantinya dapat membantu dan mempermudah UMKM untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan kuantitas

Menurut Widjaja (2002) pembinaan merupakan proses dalam berkembang yang melalui urutan-urutan seperti menumbuhkan dan memelihara pertumbuhan tersebut disertai dengan usaha memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkannya. Banyaknya pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melaksanakan kegiatan pembinaan untuk memaksimalkan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya pembinaan ini dapat meningkatkan kinerja usaha UMKM serta mempersiapkan dalam menghadapi persaingan usaha. Pembinaan yang diberikan merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk

menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil maupun menengah.

Pembinaan dalam produksi dan pengelolaan dimaksudkan adalah pelatihan dalam bentuk keterampilan yang diberikan kepada pelaku usaha. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini belum berjalan secara efektif. Dilihat dari kenyataan dalam produksi dan pengelolaan sudah terlaksana dengan diadakannya penyuluhan berupa seminar, tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan pelaku usaha yaitu pelatihan keterampilan. Dari segi pemasaran UMKM selalu terjebak dalam masalah keterbatasan pemasaran. Untuk mempermudah pelaku usaha dalam mempromosikan produknya Dinas Koperasi dan UMKM telah membantu UMKM dalam memasarkan produk hasil usaha. Meskipun dinas tersebut tidak memiliki galeri tersendiri, tetapi dinas dapat melaksanakan perannya dengan cara menghimbau UMKM tersebut untuk mengikuti pameran dan bazar yang diadakan sehingga produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Di dalam pembinaan tenaga profesional sangat dibutuhkan untuk dapat membantu UMKM dalam berwirausaha. Dari segi sumber daya manusia pembinaan yang dimaksudkan yaitu pendampingan dan pelatihan keterampilan untuk keberhasilan kegiatan guna meningkatkan daya saing bagi pelaku UMKM dengan melakukan pelatihan, bimbingan maupun fasilitasi bantuan informasi pemberian kredit perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam upaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Dari segi teknologi UMKM selalu terjebak dalam masalah memberikan pengemasan yang baik untuk menjaga kualitas dari hasil produk tersebut. Dinas Koperasi dan UMKM telah membantu pelaku usaha dalam memberikan inovasi dan

pengemasan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga dapat menarik minat masyarakat meskipun dinas masih kurang dalam pengembangan teknologi disebabkan minimnya anggaran yang dimiliki.

Kendala yang Dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan daya saing serta bertujuan untuk menekan angka pengangguran dengan cara meningkatkan semangat masyarakat untuk berwirausaha. Proses pembinaan terhadap UMKM dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari pembinaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa kendala atau hambatan dalam melaksanakan pembinaan ini.

Kendala dalam pembinaan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah susah untuk meyakinkan pelaku usaha karena pelaku usaha tidak paham dengan usaha yang digelutinya. Untuk mempermudah pembinaan pelaku usaha harus terbuka dengan dinas supaya pembinaan dapat terlaksana dengan baik. Kendala lainnya dalam pembinaan yaitu kurangnya tenaga profesional. Tenaga profesional yang dimaksudkan di sini adalah tenaga dalam penyuluhan pada saat pembinaan yang tidak sebanding dengan pelaku usaha yang akan dibina. Selanjutnya kendala yang terjadi dalam produksi dan pengolahan yaitu modal. Pelaku usaha tersebut membutuhkan modal untuk memproduksi produknya supaya tidak menghambat dalam proses jual beli. Dan kendala dalam pemasaran yaitu tidak adanya galeri untuk memasarkan produk, karena dalam berwirausaha dibutuhkannya

promosi supaya produk yang dihasilkan dapat dikenal di masyarakat.

Adapun menurut Hansen dan Mowen dalam Rina Setyaningrum dan Hamidi (2008) ada 2 kendala berdasarkan asalnya, yakni kendala internal (*Internal constraint*) dan kendala eksternal (*Eksternal constraint*). Kendala internal yang didapati dalam pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang adalah kurangnya tingkat produksi, dengan adanya produksi yang minim dapat mengurangi produktivitas jual beli. Kendala selanjutnya adalah tidak adanya galeri untuk memasarkan produk, karena dalam berwirausaha membutuhkan promosi supaya produk yang dihasilkan dapat dikenal di masyarakat.

Kendala eksternal yang didapati dalam pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah kurangnya tenaga profesional yang dikerahkan untuk membantu pelaku usaha dalam pembinaan, dan kendala lainnya susahny dalam meyakinkan pelaku usaha untuk mengikuti pembinaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam Mengatasi Kendala Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemukan, Dinas Koperasi dan UMKM harus memikirkan solusi untuk menghadapi kendala tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pembinaan diantaranya memberikan sosialisasi mengenai perlindungan produk UMKM. Sebagai pelaku usaha, izin tersebut merupakan suatu tanda legalitas bahwa UMKM memiliki usaha yang nantinya dikeluarkan atau disahkan oleh kecamatan.

Selanjutnya kendala yang ditemukan yaitu kurangnya tenaga profesional yang mendampingi pelaku usaha dalam

pembinaan. Upaya yang dilakukan adalah dinas telah memberikan pelatihan terhadap SKPD terkait sehingga dapat membantu pelaku usaha dalam pembinaan sesuai dengan kategori dan usaha yang digelutinya. Sehingga tidak akan terjadi dimana pelaku usaha yang tidak mendapatkan pembinaan karena kurangnya tenaga profesional. Sebab SKPD tersebut telah diberikan pelatihan-pelatihan untuk mendukung terlaksananya pembinaan.

Kendala lainnya adalah kurangnya tingkat produktivitas oleh pelaku usaha. Upaya yang dilakukan adalah dinas koperasi dapat membantu pelaku usaha yang terkendala dalam memproduksi barang yang disebabkan karena kurangnya modal usaha dengan mengajukan proposal bantuan dana kepada dinas. Dan kendala selanjutnya adalah dinas tidak memiliki galeri sendiri untuk memasarkan produk usaha hasil dari UMKM. Upaya yang dilakukan adalah pihak dinas mengikutsertakan pelaku UMKM dalam acara pameran, bazar dan event-event lainnya di kota Padang. Dengan demikian produk UMKM dapat dikenal di masyarakat luas.

Menurut Hafsa (2004) hal yang perlu diupayakan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagai berikut:

- a) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta dibantu dalam prosedur perizinan usaha, keringanan pajak, dan sebagainya.
- b) Bantuan permodalan.
- c) Pemerintah memberikan perlindungan usaha terhadap usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah.

- d) Diperlukannya kemitraan yang saling membantu antara UMKM dengan usaha besar.
- e) Meningkatkan pelatihan terhadap UMKM baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usaha.
- f) Dalam proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar diperlukannya media dalam mempromosikan produk yang dihasilkan.
- g) Mengembangkan kerjasama antara pemerintah dengan UMK untuk menginventarisir berbagai isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, *pertama* dalam pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM belum terlaksana secara maksimal. Karena dari segi sumber daya manusia masih kurangnya tenaga profesional untuk membantu pelaku usaha dalam pembinaan. Tenaga pendamping yang dikerahkan hanya melakukan pendataan dan membantu dalam penyuluhan seminar. *Kedua*, berkaitan dengan kendala dibagi menjadi dua, kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah kurangnya tingkat produksi dan tidak adanya galeri untuk mempromosikan produk hasil usaha dari UMKM. Kendala eksternal diantaranya masih kurangnya minat dan kesadaran dari pelaku usaha bahwa perlunya mengikuti pembinaan, kendala lainnya adalah kurangnya tenaga profesional yang dimiliki

oleh dinas. *Ketiga*, berkaitan dengan solusi adalah dengan menyediakan sarana untuk promosi bagi UMKM dalam bentuk pameran dan bazar, memberikan sosialisasi mengenai pentingnya mendapatkan pembinaan.

2. Saran

Dari hasil penelitian tersebut, saran yang diajukan dari dalam penelitian ini antara lain perlunya pemberian sosialisasi yang lebih maksimal kepada pelaku usaha mengenai perlunya mendapatkan pembinaan, membantu meningkatkan produktivitas UMKM, memiliki galeri untuk dapat mempromosikan produk hasil UMKM dan menyediakan lebih banyak tenaga profesional untuk dapat mempermudah pelaku usaha dalam pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Acuan dari Buku

Miftah Thoha . 2011 . *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* . Jakarta : Kencana
Mulyadi Nitisusastro . 2009 . *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* .

Bandung: Alfabeta

Soerjono Soekanto . 2012 . *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta : Raja Grafindo

Tulus T.H Tambunan . 2009 . *UMKM di Indonesia* . Jakarta : PT. Ghalia Indonesia

Sugiyono . 2005 . *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung : Alfabeta

Acuan dari Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Penelitian

Adil Mubarak . 2014 . *Peran Ormas dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Bidang Pemberdayaan* . Universitas

Terbuka

Lie Liana. *Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional*.
Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 15 No. 2

Raden Rudi Alhempri . *Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan terhadap Pengembangan Usaha Kecil pada Program Kemitraan Bina Lingkungan* . Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 13 No. 1

Rina M. Setyaningrum dan Muhammad Fauzan Hamidi . 2008 . *Analisis Biaya Produksi*

dengan Pendekatan Theory of Constraint untuk Meningkatkan Laba (Studi pada

PG KREATIF Baru Malang) . Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vo. 8 No. 1

Acuan dari Peraturan Pemerintah

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 1998 tentang Lingkup, Tata Cara, dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan

Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM